

BAB IV

PENUTUP

1.1.Kesimpulan

Pemerintah Desa Nyatnyono telah menunjukkan upaya nyata dalam menjalankan fungsi pelayanan, terutama dalam hal penyediaan layanan transportasi lokal yang menjadi elemen vital dalam aksesibilitas wisata religi. Tidak tersedianya kendaraan umum dari pusat kota menuju desa menjadi masalah utama yang menghambat pertumbuhan wisatawan, khususnya dari kalangan yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah desa berinisiatif menyediakan moda transportasi lokal berupa ojek dan ompreng, yang berlaku sebagai penghubung antara area parkir dengan lokasi wisata utama seperti makam Waliyullah Ki Ageng Pandanaran dan sendang.

Pelayanan ini tidak hanya berkontribusi dalam memberikan kemudahan akses bagi wisatawan, tetapi juga berdampak langsung terhadap perekonomian warga. Banyak masyarakat setempat yang terlibat sebagai pengemudi atau pemilik kendaraan angkutan, sehingga program ini menciptakan peluang kerja baru. Dengan demikian, fungsi pelayanan pemerintah desa tidak hanya bersifat administratif tetapi juga memiliki nilai ekonomis dan sosial yang tinggi.

Fungsi pengaturan atau regulasi yang dijalankan oleh pemerintah desa tercermin dalam penetapan jadwal operasional transportasi lokal serta penentuan tarif perjalanan. Pemerintah desa menetapkan jadwal operasional yang membedakan jam kerja ojek dan ompreng, guna menghindari persaingan yang tidak sehat dan menjamin keselamatan pengunjung, terutama pada malam hari.

Penetapan tarif sebesar Rp20.000 untuk perjalanan pulang-pergi juga didasarkan pada prinsip keadilan dan keterjangkauan, yang dirumuskan melalui proses musyawarah antara pemerintah desa dan pelaku transportasi lokal.

Pemberdayaan menjadi inti dari pengembangan desa wisata berbasis komunitas. Pemerintah Desa Nyatnyono telah menjalankan sejumlah program yang bermaksud untuk memperkuat kapasitas warga, khususnya pelaku transportasi lokal. Satu dari sebagian program yang menonjol adalah pelatihan keselamatan berkendara yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Program ini penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan bagi wisatawan serta membentuk citra profesionalisme dari pelaku transportasi desa.

Selain aspek teknis, pemberdayaan ekonomi juga diadakan melalui program simpan pinjam BUMDes yang mengizinkan warga mendapatkan akses pembiayaan ringan untuk menunjang kegiatan ekonomi mereka, seperti perbaikan kendaraan atau pengembangan usaha jasa lainnya. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah desa terhadap aspek inklusi keuangan yang merupakan bagian penting dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, hasil pemberdayaan tidak dapat diukur hanya dari sisi kuantitatif, seperti jumlah pelatihan atau dana yang disalurkan. Seperti ditegaskan oleh Suharto (2005), pemberdayaan yang sejati adalah yang mendorong munculnya inisiatif, keberanian mengambil risiko, serta kemampuan mandiri masyarakat dalam merencanakan dan menjalankan program mereka sendiri. Dalam hal ini, telah muncul kelompok-kelompok kerja informal yang mengelola transportasi,

penginapan rumahan, dan promosi wisata. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang bersikap pasif.

Maka itu, strategi pemberdayaan perlu terus dikembangkan secara kontekstual dan berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif yang memposisikan masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Pemerintah desa harus berperan sebagai fasilitator yang mendorong ruang dialog dan mendengarkan aspirasi masyarakat, sebagaimana disarankan oleh Chambers (1993) dalam konsep pembangunan partisipatif.

Fungsi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa terlihat dalam proyek pelebaran Jalan Yos Sudarso yang menjadi akses utama menuju desa wisata. Proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas infrastruktur yang mendukung aktivitas pariwisata. Dengan jalan yang lebih lebar dan layak, mobilitas wisatawan meningkat, kemacetan berkurang, dan distribusi ekonomi menjadi lebih merata.

Di sisi lain, pemerintah desa merancang jalur khusus bagi kendaraan wisata untuk memisahkan arus lalu lintas warga dan wisatawan. Upaya penataan ruang ini tidak hanya bermaksud meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga menjaga harmoni sosial agar aktivitas wisata tidak mengganggu kehidupan sehari-hari warga.

Desa Nyatnyono memiliki peluang besar dalam perkembangannya, mengingat kekhasannya sebagai desa wisata religi. Pemerintah desa dapat mengembangkan masterplan pembangunan pariwisata yang mencakup analisis kebutuhan infrastruktur, strategi pembiayaan, zonasi, dan integrasi antarprogram.

Masterplan ini dapat menjadi dasar pengajuan proposal kepada berbagai lembaga yang memiliki kepentingan dalam pengembangan wisata, pendidikan, atau pelestarian budaya dan religi.

Dalam proses pengembangan desa wisata, terdapat berbagai faktor yang mendukung ataupun menghambat. Partisipasi masyarakat yang tinggi, dukungan dari pemerintah daerah, serta pengelolaan anggaran desa yang berpihak pada sektor wisata menjadi faktor-faktor utama yang memperkuat posisi Desa Nyatnyono sebagai destinasi wisata religi.

Namun demikian, hambatan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan sistem transportasi regional, dan lemahnya kerja sama lintas wilayah menjadi tantangan yang harus diatasi. Menurut Chambers (1993), partisipasi sejati masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi kunci utama untuk mengurangi resistensi dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap perubahan.

Kurangnya kerjasama yang terjalin antara pemerintah desa dan pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan aksesibilitas desa wisata. Kerjasama yang terjalin dengan institusi terkait seperti dishub akan memudahkan desa Nyatnyono dalam menghadapi permasalahan utama yaitu aksesibilitas. Hambatan lainnya yang tak kalah penting adalah ketergantungan desa pada transportasi pribadi wisatawan. Kurangnya moda transportasi umum menuju desa menjadi penghalang utama dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara inklusif. Pemerintah desa memang tidak memiliki kewenangan penuh dalam

pengelolaan transportasi lintas wilayah, tetapi dapat berperan sebagai mediator dan pengusul kebijakan kepada pemerintah kabupaten ataupun operator transportasi.

1.2.Saran

Dalam mengatasi resistensi masyarakat terhadap perubahan, pemerintah desa sebaiknya tidak hanya menyosialisasikan kebijakan secara satu arah, tetapi mengajak masyarakat berdialog sejak awal perencanaan. Melalui forum musyawarah desa, kelompok diskusi terfokus (FGD), atau pertemuan RT/RW, masyarakat dapat menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka secara langsung. Dengan demikian, kebijakan seperti standarisasi kendaraan akan lebih mudah diterima karena diproses secara bersama. Di sisi lain pemerintah adapat memberikan insentif bagi pemilik kendaraan ompreng dan ojek yang bersedia menyesuaikan tampilan atau kelayakan kendaraannya sesuai standar, pemerintah desa dapat memberikan bantuan berupa subsidi cat kendaraan, rompi pengemudi, atau alat keselamatan berkendara. Ini menjadi bentuk penghargaan terhadap partisipasi aktif tanpa memaksakan perubahan secara sepihak. Perubahan sosial memerlukan pendekatan yang selaras dengan nilai lokal. Libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat dalam proses komunikasi kebijakan, agar mereka dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Peran mereka sangat penting dalam membentuk opini publik dan mengurangi resistensi.

Dalam memenuhi penguatan jaringan dan advokasi eksternal pemerintah desa dapat melakukan pelatihan perencanaan program, pembuatan proposal kerja sama, dan advokasi kebijakan agar perangkat desa lebih siap menjalin kemitraan dengan lembaga eksternal. Identifikasi dan jalin komunikasi awal dengan institusi

seperti Dishub, Bappeda, serta universitas atau lembaga yang memiliki kepedulian terhadap transportasi pedesaan dan pengembangan pariwisata. Buat roadmap atau rencana kerja sama lintas sektor yang dapat ditawarkan ke pihak luar, lengkap dengan data potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan indikator keberhasilan.

Permasalahan infrastruktur dapat dilakukan dengan upaya pengajuan dokumen usulan resmi pembukaan trayek baru atau layanan angkutan wisata dari kota/kecamatan ke Desa Nyatnyono, dilengkapi data potensi wisata dan jumlah kunjungan. Pemerintah desa dapat mengajukan proposal ke CSR perusahaan untuk pembangunan shelter, rambu, papan informasi, dan fasilitas pendukung transportasi lainnya.

Gandeng universitas atau lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan tentang promosi digital, pembuatan konten wisata, dan manajemen destinasi kepada warga desa. Libatkan mahasiswa KKN atau komunitas wisata dalam mendampingi warga lokal selama proses peningkatan kapasitas, khususnya dalam pengelolaan dan pemasaran wisata. Bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai lembaga lokal yang fokus pada pengembangan dan promosi wisata secara berkelanjutan.